

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Syamsu Rizal*); M Irwan Tahir; Rossy Lambelanova
Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta
**email: rizalsyamsu2712@gmail.com*

Paper Accepted: 30 Juni 2021
Paper Reviewed: 01-07 Juli 2021
Paper Edited: 08-15 Juli 2021
Paper Approved: 16 Juli 2021

ABSTRAK

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan di suatu wilayah, lazimnya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan program PNPM Mandiri, mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program, serta mengetahui dan mengevaluasi kriteria kebijakan, upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kriteria kebijakan program, kendala dan hambatan serta upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Berdasarkan hasil pembahasan dan observasi lapangan, maka temuan penelitian dengan menggunakan teori 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dapat disimpulkan bahwa ketepatan program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin di wilayah, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat miskin yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari hasil tiap hari memberikan hasil/ insentif kepada mereka digunakan untuk pengembangan dan kebutuhan mereka sendiri.

Kata Kunci : PNPM Mandiri; Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan di suatu wilayah, lazimnya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah. Dengan demikian Kemiskinan menjadi salah satu Tema utama Pembangunan melalui tangan Pemerintah dan kebijakan pemerintahan lah yang akan menentukan kesejahteraan rakyatnya.

Penerapan otonomi daerah yang diimplementasikan di Indonesia telah memperluas ruang partisipasi politik kepada rakyat dalam perumusan kebijakan dan program

pembangunan. Otonomi Daerah dimaksud adalah untuk dapat lebih mendorong masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada pada daerahnya. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama terkait dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang efektif di daerah. Pengembangan kebijakan publik yang berbasis pada perubahan pola pikir hendaknya menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pemerintahannya seperti merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) "Upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an. Secara umum angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2013 terus menurun. Berdasarkan data dari BPS persentase tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999 mencapai 23,43 persen. Pada tahun 2006 mengalami penurunan sekitar 6 persen atau 17,75 persen, sedangkan pada tahun 2013 menurun juga sekitar 6 persen atau 11,37 persen. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah telah memberikan efek positif bagi masyarakat.

Usman dalam Jamaludin Adon Nasrulloh (2015: 236) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidup dalam kekurangan. Keterlibatan pemerintah dalam menanggapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir, sikap mental mereka.

Selanjutnya dikatakan, yaitu dalam pengentasan kemiskinan untuk mengurangi kemiskinan diperlukan program dan aksi nyata. Untuk itu, sejak tahun 2007 dilakukan langkah-langkah pengurangan kemiskinan secara terpadu dengan tiga jenis paket. Paket pertama disebut dengan bantuan dan perlindungan sosial. Paket kedua adalah pemberdayaan memberdayakan kecamatan dan kelurahan melalui Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) Mandiri. Paket ketiga adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha kecil dan menengah.

Definisi kemiskinan yang digunakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sedangkan Bank Dunia mendefinisikan penduduk miskin sebagai warga yang hidup dalam mendapatkan di bawah US\$2 perhari.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mandiri melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaannya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat Kelurahan, sasaran PNPM Mandiri cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan.

BPS DKI Jakarta tahun 2019 mencatat sekitar 3,4 juta warga DKI Jakarta dari 10,5 juta penduduk di DKI Jakarta hidup di bawah garis kebutuhan hidup layak (KHL). Parameter KHL ini dihitung dari penghasilan per kapita minimal sebesar 3,3 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, penduduk miskin dihitung dengan kebutuhan secara 2.100 kalori atau berpenghasilan sekitar 640.000 rupiah per bulan, Nilai IPM DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 80,76 persen adalah yang tertinggi diantara provinsi lainnya. Sedangkan Jakarta Selatan nilai IPM sebesar 80,26 adalah yang tertinggi di DKI Jakarta.

Kehidupan yang semakin berkembang di daerah perkotaan terutama pada kehidupan Ibukota DKI Jakarta dengan tuntutan atau keperluan hidup yang berkualitas, serta agar dapat menyeimbangi dengan model kehidupan yang ada di DKI Jakarta. Pengeluaran yang besar di DKI Jakarta menuntut seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih untukukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan data diatas rendahnya pendapatan yang ada

disebabkan oleh tingginya jumlah pengangguran, dikarenakan dengan tingkat kualitas pendidikan yang rendah, sehingga tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pendidikan menjadi salah satu persaingan untuk mendapatkan peluang pekerjaan di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan perkembangan kehidupan dari segi teknologi, pengetahuan dan keterampilan yang berimplikasi pada tingkat pendidikan yang tinggi untuk dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta.

Kemiskinan dapat dilihat dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di bawah garis kemiskinan mengalami kenaikan. Kemiskinan pada umumnya juga di Kecamatan Cilandak disebabkan kenaikan jumlah penduduk dengan kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 11.786 per km persegi. Kemiskinan juga terlihat pada tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat yang ada di Kecamatan Cilandak.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Cilandak dilaksanakan berdasarkan penyebab kemiskinan, agar PNPM dapat melaksanakan program bantuan pada tingkatan yang sesuai, dan mengupayakan dapat meningkatkan kualitas seseorang untuk meningkatkan pendapatan seiring dengan perkembangan kemajuan taraf hidup yang ada di daerah perkotaan khususnya di DKI Jakarta.

Rumusan Masalah

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.

Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-

jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Menurut Arikunto evaluasi memiliki dua tujuan yakni secara umum dan khusus (Arikunto, 2012). Tujuan secara umum menitikberatkan pada suatu program secara menyeluruh. Tujuan secara khusus fokus pada setiap komponen dalam manajemen suatu organisasi.

Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan ?

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Dunn dalam Hamdi (2014:114) mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk kebijakan yang dapat digunakan dalam setting politik untuk memecahkan masalah kebijakan.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa analisis kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Model implementasi kebijakan yang bersifat top-down yang dikembangkan oleh George C. Edwards III (Winarno 2007:150) menjelaskan bahwa, Model implementasi kebijakan publik dengan *direct and indirect impact on implementation*. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Definisi kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah merupakan rangkaian konsep dan azas menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi, pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan garis haluan.

Kebijakan (*policy*) merupakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan (Rose dalam Hamdi, 2014:36).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich (Hamdi, 2014:36) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi, atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Pendapat lain Anderson dalam Syafri dan Setyoko (2010:11) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor/pelaku guna mengatasi suatu masalah tertentu. Kebijakan publik pada dasarnya meliputi keseluruhan aspek kehidupan baik yang bersifat memberikan pelayanan melakukan pengaturan pendistribusian apa saja yang menjadi harta benda dan kekayaan negara menggali sumber daya alam, untuk mobilisasi dana negara melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan lainnya sebagainya

Berdasarkan para pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau pelaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan keputusan dari target, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaring kekuatan pokok pada ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan. Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, seberapa jauh tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, permasalahan ini menyangkut kekuasaan dan pihak yang sangat rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan, seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi hal ini menyangkut masalah kepatuhan.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan, disamping itu standar dan tujuan kebijakan mempengaruhi tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi atau organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan diasumsikan pada persepsi dan intervensi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian hal itu

bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyumbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat merumuskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antara sumberdaya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang organisasi untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan, jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Kemiskinan

Jamaludin, (2015:236) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidup dalam kekurangan. Selanjutnya, menurut Sumodiningrat dalam Jamaludin (2015:236), masalah kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan non ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya, kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*Social well-being*).

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, dan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seseorang ataupun suatu keluarga dapat dikategorikan miskin, apabila seseorang maupun keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup secara cukup atau layak.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak yang lebih melihat persoalan kemiskinan pada tataran gejala-gejala yang nampak terlihat dari luar atau di dataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam

berbagai bentuk (Jamaludin, 2015:232) seperti antara lain:

1. Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak termasuk informasi;
2. Dimensi Sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasinya warga miskin ke dalam situasi sosial yang ada, terinterfinalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka terhadap nilai-nilai kapital
3. Dimensi Lingkungan, sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman;
4. Dimensi Ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak;
5. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk kualitas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Program penanggulangan kemiskinan terfokuskan pada salah satu dimensi dari segala gejala-gejala kemiskinan tanpa memikirkan akan penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, program-program yang telah direncanakan maupun yang telah dilaksanakan tidak mampu menumbuhkan kemandirian dari masyarakat tersebut, sehingga penyebab ketergantungan dari masyarakat miskin atau masyarakat lapis bawah terhadap program-program ataupun kebijakan yang telah dibuat tanpa ada solusi atau pemecahan tentang penanggulangan kemiskinan tersebut.

Dimensi kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal.

Pembangunan

Menurut Fellman dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:11), pengertian pembangunan atau pengembangan adalah:

1. Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri, sehingga berguna dalam produksi barang.
2. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi.

Pembangunan berdasarkan pendapat di atas merupakan suatu proses perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat menuju ke arah perubahan yang lebih baik secara berencana dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu pembangunan dapat dikatakan sebagai perubahan yang direncanakan dan terus-menerus untuk kearah yang lebih baik melalui tahapan-tahapan tertentu dan dilakukan sesuai dengan perubahan ataupun permasalahan yang ada.

Sen (2010:8) mengatakan bahwa "*welfare economic*" merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfilment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*). Selanjutnya Sen (2010:39-45) lebih memilih "*capability approach*" di dalam menentukan standar hidup, Sen mengatakan "*the freedom or ability to achieve desirable functionings is more importance than actual outcomes*".

Terlihat bahwa konsep pembangunan masyarakat dengan beberapa paradigma yang diawali dengan paradigma pertumbuhan, pertumbuhan dan pemerataan, pembangunan berkelanjutan serta pembangunan manusia, yang dilaksanakan pada negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia, dengan paradigma pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang

lebih baik, maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan atau masyarakat yang berdaya.

Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya potensi ekonomi masyarakat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, serta nilai budaya masyarakat sebagai konsep sosial budaya, maka yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan tidak hanya menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi sosial budaya masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah program nasional dalam wujud kebijakan sebagai dasar dan tujuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat PNPB dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan, pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini desain yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif. Menurut Rusidi (2006:24) penelitian kualitatif dilakukan pada empirik secara mendalam tetapi tidak meluas untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkrit, spesifik dan lokus (KSL). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (berbagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, salah satu ciri penelitian kualitatif bahwa tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai, hipotesis justru dibangun selama tahap-tahap penelitian setelah diuji dan dikonotasikan dengan data yang diperoleh peneliti selama penelitian tersebut.

Menurut Ndraha (2003:632) peneliti kualitatif adalah "*to cut thought common sense understandings of truth and reality*" dan "*to present them for what they are*". Maksudnya dalam melaksanakan penelitian peneliti harus ekstra hati-hati, agar subyektifitas mereka tidak mempengaruhi proses penelitian.

Pada penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Menurut Soewargono dalam Sadu Wasistiono dan Simangungsong (2004:52) dalam orasi ilmiahnya, salah satu metode yang paling umum digunakan dalam mempelajari ilmu

pemerintahan adalah metode studi kasus seperti pada studi manajemen yang menjelaskan antara teori dan praktek. Pemerintah sebagai sebuah pengetahuan (*knowledge*) dan kemahiran (*know-how*) sangat cocok dipelajari dengan metode studi kasus, Yin (2002:61) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tipe studi kasus yaitu:

1. Studi kasus eksplanatoris
2. Studi kasus eksploratoris
3. Studi kasus deskriptif

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif, dengan sifat menggambarkan kasus yang diteliti dengan memperhatikan dokumentasi dari masalah yang diteliti. Penulis melaksanakan wawancara langsung dengan informan, dan observasi langsung di lapangan dengan menyimak masalah yang diteliti bahkan langsung kepada informan. Studi kasus deskriptif dengan sifat menggambarkan masalah yang telah terjadi karena masalah terjadi setiap hari, setiap hari terjadi peristiwa dan peristiwa yang terjadi ada yang mempunyai nilai dan ada pula yang tidak mempunyai nilai.

Sumber Data/ Informan dan Cara Menentukannya

Sumber data ditentukan oleh tempat dimana peneliti melakukan penelitian dengan menentukan orang-orang yang berkompeten langsung dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data

Arikunto (2012:107) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah sumber data diperoleh. Apakah peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, dan apabila menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda bergerak, dan apabila peneliti menggunakan dokumen, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.

Informan adalah orang yang mampu memberikan data atau informasi tentang keadaan dirinya sendiri, sedangkan informan adalah orang yang mampu memberikan data atau informasi yang benar-benarnya tentang orang lain atau lingkungannya.

Menurut Riduan (2012:24), sumber data ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengambilan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Data primer adalah

data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut dimana data itu dikumpulkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dengan penelitian terhadap data dokumen laporan-laporan, brosur, surat kabar, dan bahan kepustakaan lainnya yang sesuai dengan judul penelitian.

Cara Menentukan Sumber Data/ Informan

Menurut Arikunto (2012:116), adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian informan dipergunakan berdasarkan sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2006:96) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel (informan). Hal ini dilakukan bila jumlah unit analisisnya kurang dari 30 orang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, menjangkau sebanyak

mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cilandak. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Data Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	KET.
1.	Premi Lasari	Kadis Sosial Prov. DKI Jakarta	Diwakili Kasi Kemiskinan Ibu Sumirah
2.	Maryono	Kasudin Sosial Jak-Sel	Diwakili kasi Kemiskinan Ibu Yati
4.	Fatur Rohim	Kasudin PPAPP Jak-Sel	Diwakili Kasatpel PPAPP Cilandak Bapak Ardisal
5.	Irfan	Kabag Kesra Walikota Jak-Sel	Diwakili Kasubag Kesra Wjs. Bapak Budi Sulistio
6	H. Mundari,S.IP,M.Si	Camat Cilandak	Diwakili Sekcam Cilandak Bapak Sunardi
7	Ibu Nurul	Lurah Kec. Cilandak	Diwakili Sekel Kec. Cilandak Bapak Suropto
8	Bapak Yulian Warman	Swasta. Kepala CSR PT. FIFGroup	
9	Nining Kuswidianingsih, SE	Kasatpel Dukcapil Kec. Cilandak	
10	Drs.H.R. Tony Prasetyarto, M.Pd	Kasatpel Pendidik-an Kec.Cilandak	
11	Nining Kuswidianingsih, SE	Kasatpel Dukcapil Kec. Cilandak	
12	M. Hasan	Kasi Kesra kel. Pondok Labu	
13	Ibu Theresia	Ketua LKM Cilandak	
14	Ibu Anna Styaningsih	Anggota LKM pengurus UPK	

15	Ibu Nur	Pemanfaat warga Cilandak	
16	Nano	Tokoh masyarakat Kec. Cilandak	

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Cilandak merupakan sebuah kebijakan dalam program peningkatan kesejahteraan di Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta. Secara umum Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dilaksanakan dengan 4 (empat) tahap antara lain:

1. Perencanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi
4. Pelestarian

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri atas 14 Kriteria Kemiskinan. Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat Kelurahan, sasaran PNPM Mandiri cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan

Definisi kemiskinan yang digunakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah, "Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sedangkan Bank Dunia mendefinisikan penduduk miskin sebagai warga yang hidup dalam mendapatkan di bawah US\$2 per hari

BPS DKI Jakarta tahun 2019 mencatat sekitar 3,4 juta warga DKI Jakarta dari 10,5 juta penduduk di DKI Jakarta hidup di bawah garis kebutuhan hidup layak (KHL). Parameter KHL ini dihitung dari penghasilan per kapita minimal sebesar 3,3 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, penduduk miskin dihitung dengan kebutuhan secara 2.100 kalori atau berpenghasilan sekitar 640.000 rupiah per bulan, Nilai IPM DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 80,76 persen adalah yang tertinggi diantara provinsi lainnya. Sedangkan Jakarta Selatan nilai IPM sebesar

80,26 adalah yang tertinggi di DKI Jakarta.

William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan sejalan dengan kriteria rekomendasi kebijakan tersebut, Dunn mengemukakan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan antara lain: 1). Efektifitas 2). Efisiensi 3). Kecukupan 4). Perataan 5). Responsivitas 6). Ketepatan.

Efektifitas

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan sebuah kebijakan dalam program peningkatan kesejahteraan di Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mandiri melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaannya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007.

Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif.

Prinsip-prinsip PNPM Mandiri, Program PNPM Mandiri memiliki prinsip-prinsip dalam program yaitu, Pemberdayaan dan Keberpihakan kepada warga yang tidak mampu. Dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat harus dapat mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Lembaga Masyarakat Kelurahan (LKM) dan tokoh masyarakat dan RT/RW menuju kemandirian, seperti yang dijelaskan oleh ketua LKM ibu Theresia sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya institusi lokal yang merupakan pelaksana atau pelaku langsung dari kegiatan yaitu, terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan pelaku atau pelaksana

langsung dalam melaksanakan kegiatan dari PNPM Mandiri.

- 2) Tingginya daya tanggap dan kepatuhan masyarakat terlihat dalam pemberian bantuan swadaya baik itu berupa tenaga maupun materi serta tersusunnya proposal dalam setiap kegiatan.
- 3) Terpeliharanya sifat gotong-royong di antara sumberdaya yang dikerahkan, yaitu masyarakat khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Cilandak sebagai bentuk swadaya masyarakat.
- 4) Tersusunnya PJM-Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) tahun 2014-2016 yang menjadi strategi dari aktor yang terlibat agar program tersebut bisa menjadi prioritas dalam Musrenbang, sehingga menghasilkan derajat perubahan yaitu pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberpihakan kepada warga tidak mampu, setiap kegiatan yang dilaksanakan baik dalam proses maupun dalam pemanfaatan diutamakan bagi peningkatan kualitas hidup warga yang kurang mampu.

- 1) Program mengharuskan keterlibatan masyarakat kurang mampu mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, penentuan usulan kegiatan, pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan pemeliharaan.
- 2) Masyarakat tidak mampu harus mewakili baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan seluruh pertemuan-pertemuan lainnya.
- 3) Perlindungan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka perlu adanya keberpihakan terhadap warga yang kurang mampu.

Pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri sendiri melibatkan masyarakat yang kurang mampu, sehingga memberi manfaat dan dampak bagi sasaran, hal tersebut dikatakan oleh Kasatpel Cilandak Sudinsos Jakarta Selatan, Bapak Dalmaji (22 Maret 2021) yaitu, “Pelaksanaan program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di kelurahan mencapai sasaran yang telah

ditetapkan, sehingga perlu upaya untuk memodifikasi bentuk program dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang akan menerimanya, agar pelaksanaan program sejenisnya di kemudian hari dapat lebih memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat yang menerimanya terutama masyarakat tidak mampu.”

Efisiensi

Proses pelaksanaan program merupakan saat yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program dilaksanakan, untuk itu proses pelaksanaan membutuhkan pengenalan program kepada publik melalui sosialisasi. Dari seluruh tahapan pengisian formulir diatas termuat dalam bagian besar yaitu, Perencanaan; penggalan gagasan, Pelaksanaan; kegiatan lapangan, buku kas, LPD (laporan penggunaan dana) pembuatan infrastruktur, berupa siapa, kerja apa, dan dimana pekerjaan itu dilaksanakan, dan waktunya kapan

Ketentuan Pelaksanaan, Program PNPM Mandiri memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu, Pendanaan dan Mekanisme Penyaluran Dana. Program PNPM Mandiri adalah program dari pemerintah dan dana tersebut bersumber dari dana pemerintah pusat seperti yang dijelaskan oleh Ketua LKM (Ibu Theresia):

Program PNPM Mandiri ini sendiri merupakan nama program dan kegiatan dari pemerintah pusat, dana yang bersumber dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan fisik dan ekonomi, sedangkan untuk operasional dibantu dari bersumber dari dana lainnya.

Untuk mencairkan dana PNPM Mandiri peraturan mengharuskan setiap LKM mengajukan dana kegiatan yang akan dilaksanakan di kelurahan seperti yang dijelaskan oleh ketua LKM ibu Theresia sebagai berikut:

Untuk mendapatkan pencairan dana tahap pertama LKM diminta mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan, setelah dana diterima oleh LKM atau oleh masyarakat, agar direncanakan kegiatan tersebut diperiksa guna pencairan dana berikutnya dilaksanakan, setelah diperiksa dibuat SP2D dan langsung di serahkan ke bank dan ditransfer ke rekening LKM melalui rekening pendamping.

Kecukupan

Keluaran Program, keluaran atau hasil yang diharapkan dari PNPM Mandiri di Kecamatan Cilandak secara umum, yaitu perubahan perilaku/kesadaran masyarakat mengenai dirinya sendiri atas kapasitas, potensi yang dimilikinya serta masalah dan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri (ketua LKM) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam merencanakan dan mengelola program, sehingga semakin mampu melepaskan ketergantungan dan kemandirian menuju masyarakat sejahtera.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam setiap kegiatan program.
3. Tumbuhnya usaha keluarga/kelompok masyarakat secara berkelanjutan.
4. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang diperlukan.
5. Perbaikan pelayanan, dan perhatian dan peran pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat
6. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
7. Meningkatnya peran kelembagaan melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)

Pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri sendiri melibatkan masyarakat yang kurang mampu, sehingga menyentuh sasaran, hal tersebut dikatakan oleh saudara Nano:

Program PNPM Mandiri dilaksanakan di tingkat kelurahan/RW secara transparan oleh Aparat kelurahan dan tim kerjanya, sehingga sebagai masyarakat kecil kami terpengaruhi oleh program tersebut, kami mengharapkan supaya kalau ada bantuan-bantuan seperti ini tolong lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat kecil seperti kami, supaya semua tahu dan mengerti tentang program apa yang dilaksanakan programnya apa dan apa yang dilaksanakan, dan tujuannya kepada siapa. Kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan di tingkat kelurahan dan RW menurut saya cukup optimal, karena sebagian masyarakat ingin mendapatkan, namun kalau dilihat dari jumlah sasarnya program ini ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah di lingkungan RT/RW dan kelurahan.

Selanjutnya program pemberdayaan masyarakat di kecamatan Cilandak dijelaskan oleh ketua LKM sebagai berikut:

Dengan dibentuknya sebuah Tim Perencana Partisipatif LKM Mandiri Utama dalam Buku Laporan PJM Pronakis Tahun 2014-2016, yaitu: Penetapan prioritas kebutuhan penanggulangan kemiskinan Kelurahan dan Rencana Aksi PJM 3 tahunan untuk bidang sosial dan ekonomi serta Lingkungan. Melalui PJM Pronangkis ini ada beberapa strategi yang dilakukan selain pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM-MP yaitu: mengupayakan keperdulian dari perusahaan swasta (*Corporate Sosial Responsibility*), LSM, pemerintah daerah, juga kelompok peduli yang ada. Selain itu diupayakan juga tingkat swadaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan sebagai bentuk kepedulian atas persoalan yang dihadapi. Sebagian sasaran pemanfaat dari kegiatan ini sebagaimana yang direncanakan sebelumnya yaitu meliputi 5 RW fokus (RW 01, RW 02, RW 03, RW 08, RW 10) sebagai basis kegiatan, walau kedepan tidak menutup kemungkinan akan ada pengembangan dari RW yang lain.

Dengan konsentrasi pada peningkatan kualitas penanggulangan kemiskinan yang disusun selaras dengan target Millenium Development Goals (MDG's) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan harapan program yang disusun dan lembaga yang dibentuk masyarakat pada tingkat kelurahan mampu memberikan kontribusi yang positif pada persoalan yang ada di masyarakat. Maka disusunlah kembali PJM Pronangkis untuk masa 3 tahun kedepan yaitu tahun 2014-2016 oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Mandiri Utama berkedudukan di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta didirikan di Negara Republik Indonesia, dengan Akta Notaris No. Reg 001/Waark/11/2009, tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Endah Harwant, SH.MKn Notaris.

Terbentuk dan berfungsinya LKM merupakan persyaratan bagi disalurkan dana bantuan Program Pemerintah Daerah Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2018-2019 kepada masyarakat di Kelurahan. Adapun maksud dan tujuannya adalah mengelola dana hibah Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk disalurkan pada masyarakat dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dalam jangka panjang LKM merupakan forum yang bertugas mengelola berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang bersangkutan khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan

dengan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Susunan Pengurus LKM tahun 2019 adalah sebagai berikut, Koordinator: Theresia Patty Konay, Anggota: Sri Widiayati, Rusminingsih, Iis Sumardi, Yuni, Ester, Yanti, Sekretariat: Yuliana Ose Unan, UPK: Anna Styaningih.

Perataan

Program pemberdayaan masyarakat telah dicetuskan oleh pemerintah pusat sejak dikeluarkan Inpres Desa Tertinggal hal ini dijelaskan oleh ketua LKM sebagai berikut: “Program pemberdayaan pertamanya diturunkan oleh pemerintah pusat dengan nama program adalah IDT (Inpres Desa Tertinggal), bantuan tersebut berjumlah 20 juta sampai 40 juta per Kelurahan. Kemudian pemerintah mengubah program pemberdayaan berikutnya dengan nama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) dengan jumlah dana program berkisar antara 500 juta sampai 700 juta dengan sebutan yang lebih dikenal masyarakat adalah Block Grant. Kemudian munculah program PNPM Mandiri program dari pemerintah pusat menyediakan dana untuk program ini adalah sebesar 100 juta.”

Selanjutnya program pemberdayaan masyarakat di kecamatan Cilandak dijelaskan oleh pendamping disekretariat LKM (Ibu Anna Setyaningsih):

“Keterbukaan, segala sesuatu menyangkut program wajib terbuka dan harus diketahui semua warga. Dengan keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi, yang dimaksud adalah keterlibatan seluruh masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut usulan kegiatan dan pendanaan, melalui pertemuan-pertemuan setelah dibahas dalam pertemuan kelompok dan lain-lain.”

Responsibilitas

Program PNPM Mandiri merupakan pemberdayaan masyarakat dari program pemerintah pusat yang di laksanakan oleh pemerintah daerah telah diketahui oleh masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan kegiatan menyentuh masyarakat kurang mampu, sehingga sebagian masyarakat kurang mampu perlu mengetahui program tersebut yang dikatakan oleh Ibu Theresia Ketua LKM menyatakan:

“Pelaksanaan kegiatan dan program, pada dasarnya sangat terbuka

untuk semua masyarakat yang akan didanai, terutama untuk kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat kurang mampu, serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.”

Program yang berhasil dilaksanakan di kelurahan yaitu posyandu, karena posyandu tersebut memberdayakan ibu-ibu baik yang masih hamil maupun yang sudah memiliki anak balita, disini jumlah masyarakat yang aktif banyak, bila dibandingkan dengan keikutsertaan yang dilaksanakan dari program PNPM Mandiri. Dari dana yang kami peroleh tersebut kami juga memberikan insentif kepada mereka yang ikut aktif dan juga menjadi kader pemberdayaan perempuan.

Ketepatan

Faktor ketepatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dan kegiatan apapun yang dilaksanakan di tingkat kelurahan atau di tingkat masyarakat, salah satu keberhasilan dari program ini menyangkut sumberdaya manusia, walaupun bagaimana sumber daya manusia adalah faktor penentu, hal ini seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Kelurahan Pondok Labu Suropto (16 Maret 2021):

“Sumber daya manusia juga merupakan masalah utama dalam program PNPM Mandiri di Kelurahan Pondok Labu secara khusus dan pada umumnya di Provinsi DKI Jakarta, sebagai contoh kelurahan Pondok Labu pernah diadakan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) program ini berjalan ketika dilaksanakan pada waktu dana dipinjam dan dana tersebut tidak dikembalikan, sehingga tidak ada lagi uang yang akan disimpan dan diputar dalam simpan pinjam tersebut akhirnya bangkrut dan tidak berjalan.”

Selanjutnya, adapun kegiatan-kegiatan dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan masyarakat yang mengambil bagian hanyalah mereka yang mempunyai wawasan dan yang lanjut usia, sementara yang lainnya tidak mengambil bagian karena faktor sumber daya manusia rendah. Ada pula yang menilai dana PNPM Mandiri tersebut bersumber dari pemerintah pusat, sebagian beranggapan uang itu untuk dipakai dan tidak perlu dibuat kegiatan ataupun dipertanggungjawabannya kepada pemerintah. Ada juga yang acuh tak acuh terhadap program-program yang diturunkan pemerintah karena rendahnya sumber daya manusia. Kemudian juga dikatakan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Rani Nurani, S.Sos, M.Si (23 Maret 2021) bahwa:

“Program pemerintah PNPM Mandiri kebijakan dan perencanaan yang matang dari atas, namun pada pelaksanaannya di tingkat bawah ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan dikarenakan ada faktor sumberdaya manusia yang masih rendah.”

Untuk pemberdayaan masyarakat jangka panjang, pemberdayaan juga harus menyentuh pada bidang pendidikan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM. Dengan harapan pemberdayaan di bidang pendidikan dapat menjadi pondasi untuk pemberdayaan di bidang lainnya. Seperti yang dijelaskan Kasatpel pendidikan Cilandak Bapak Tony Prasetyarto (28 Maret 2021), bahwa:

“Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia menuju kepribadian mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekitarnya, membangun dan melatih keterampilan, serta meningkat wawasan dan pengetahuannya.”

Selanjutnya dikatakan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, M. Hasan, bahwa program PNPM Mandiri sangat membantu masyarakat miskin dan aparat kelurahan.

Program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin di Kelurahan Pondok Labu dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat miskin, yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari hasil yang mereka laksanakan tiap hari akan memberikan insentif kepada mereka dan dari situ mereka sudah dapat membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, akan tetapi hasil yang mereka kerjakan juga dapat mereka gunakan untuk pengembangan dan untuk kebutuhan mereka sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Efektivitas Program PNPM Mandiri

Terbentuknya institusi lokal yang merupakan pelaksana atau pelaku langsung dari kegiatan yaitu, terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan pelaku atau pelaksana langsung dalam melaksanakan kegiatan dari PNPM Mandiri. Tingginya daya tanggap dan kepatuhan masyarakat terlihat dalam pemberian bantuan

swadaya baik itu berupa tenaga maupun materi serta tersusunnya proposal dalam setiap kegiatan. Terpeliharanya sifat gotong-royong di antara sumberdaya yang dikerahkan, yaitu masyarakat khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Cilandak sebagai bentuk swadaya masyarakat. Serta tersusunnya PJM-Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) tahun 2014-2016 yang menjadi strategi dari aktor yang terlibat agar program tersebut bisa menjadi prioritas dalam Musrenbang, sehingga menghasilkan derajat perubahan yaitu pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi Program PNPM Mandiri

Proses pelaksanaan program merupakan saat yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program dilaksanakan, untuk itu proses pelaksanaan membutuhkan pengenalan program kepada publik melalui sosialisasi, sosialisasi terdiri dari enam bentuk (Sosialisasi program, Muscam, Muskel, Pelatihan pelaku, PBM, MKPP). Dalam melaksanakan program PNPM Mandiri ada beberapa tahapan yang besar yang harus dilewati agar program tersebut dilaksanakan (Perencanaan, persiapan pelaksanaan, administrasi pelaksanaan, administrasi kelompok, dan seterusnya). Sistem pencairan dana PNPM Mandiri, tim pendamping dan tokoh masyarakat, Ketua RW atau Ketua LKM mencairkan dana dari bank dan langsung menyerahkan kepada TPP RW yang melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan sebelumnya, dan didampingi aparat kecamatan dan kelurahan, sehingga dari pihak aparat hanya mengawasi saja kegiatan-kegiatan di masyarakat. Masyarakat sudah proaktif dalam kegiatan dibandingkan dengan sebelumnya, tingkat pemahaman masyarakat semakin hari semakin baik.

Kecukupan Program PNPM Mandiri

Keluaran atau hasil yang diharapkan dari PNPM Mandiri di Kecamatan Cilandak secara umum, yaitu perubahan perilaku/kesadaran masyarakat yaitu, (meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat, tumbuhnya usaha keluarga/kelompok., tersedianya sarana prasarana, perbaikan pelayanan, keterlibatan masyarakat monitoring dan mengevaluasi, meningkatnya peran kelembagaan melalui LKM). Program PNPM Mandiri dilaksanakan di tingkat kelurahan/RW secara transparan oleh Aparat kelurahan dan tim kerjanya, sehingga

sebagai masyarakat kecil tersentuh oleh program tersebut, segala bantuan-bantuan disosialisasikan kepada masyarakat kecil. Kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan di tingkat kelurahan dan RW cukup optimal, karena sebagian masyarakat mendapatkan program dengan sasaran program ini ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah di lingkungan kelurahan dan Rt/Rw.

Perataan Program PNPM Mandiri

Keterbukaan, segala sesuatu menyangkut program wajib terbuka secara transparan dan harus diketahui semua warga. Dengan keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi, partisipasi dan keterlibatan seluruh masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut usulan kegiatan dan pendanaan, melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya dibahas dalam pertemuan kelompok dan lain-lain. Dana program digunakan untuk kegiatan dan pelestarian/pemeliharaan dan pengembangan kegiatan yang dilaksanakan. Dana atau anggaran untuk kegiatan yang bermanfaat dan melibatkan banyak anggota masyarakat terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dana program juga digunakan untuk kegiatan usaha simpan pinjam masyarakat, peminjam didasarkan pada kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dan dana ini bersifat bergulir dan harus dikembalikan sesuai jadwal yang disepakati bersama, selanjutnya digulirkan kepada masyarakat lainnya. Sasaran utama penerima program adalah masyarakat kurang mampu menurut pendapatan. Keputusannya ditetapkan melalui proses Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM). Sasaran, lokasi penerima program dengan mempertimbangkan pada jumlah penduduk dan sosial ekonomi.

Responsibilitas program PNPM Mandiri

Pelaksanaan kegiatan menyentuh masyarakat kurang mampu, sebagian masyarakat kurang mampu mengetahui program tersebut, masyarakat adanya program PNPM Mandiri yang diprogramkan oleh Pemerintah pusat, yang dengan tujuan utamanya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan Cilandak, program ini ketika diprogramkan pemerintah sudah berpihak terhadap masyarakat kecil di wilayah kelurahan

atau RT dan RW, dan dilapangan, sosialisasi diadakan secara berkala, dan sebagian masyarakatnya kurang memperhatikan adanya sosialisasi tersebut. PNPM Mandiri adalah Program Nasional berbasis Pemberdayaan ini secara administrasi sudah berjalan dan dari sisi administrasi sudah baik dilaksanakan, dan kegiatan ini dipertajam dengan komitmen para pelaku kegiatan PPK, LMK, KSM terhadap kualitas output yang dihasilkan agar supaya berdayaguna dan berhasilguna untuk kepentingan masyarakat.

Ketepatan Program PNPM Mandiri

Program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin di wilayah kelurahan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat miskin, yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari hasil yang mereka laksanakan tiap hari akan memberikan insentif kepada mereka, dan dari situ mereka sudah dapat membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, hasil yang mereka kerjakan juga dapat mereka gunakan untuk pengembangan dan untuk kebutuhan mereka sendiri. Pelaksanaan kegiatan program diperlukan sosialisasi, sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan, kegiatan sosialisasi program ini cukup optimal, dan perlu dikembangkan tentang pelaksanaan sosialisasi ini. Selanjutnya untuk pengembangan kegiatan program ini dilaksanakan pengawasan, dan pengawasan yang berjalan juga cukup optimal sehingga banyak pekerjaan yang selesai 100 persen

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. 2012
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Kencana Predana Media Grup. Jakarta 2007
- Dunn, William, , Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua di terjemahkan oleh Gajah Mada University Yogyakarta. 1999
- Dunn, William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Penterjemah DRS. Samudra Wibawa, MA,dkk), Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2003.
- Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Huraerah, Abu. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan

- Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora Utama. 2008.
- Irawan Prasetya. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. DIA FISIF UI. 2006.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. Sosiologo Perkotaan, Bandung CV Pustaka Setia. 2015.
- Jayadinata, Johara T dan I.G.P. Pramandika. 2006. Pembangunan Desa dalam Perencanaan. Bandung: ITB
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta
- Maipita, Indra. 2014. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Moleong. Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasir. 1993. Metodologi Penelitian. Anggota IKPI. Gloria Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nicholson, W. 1992. *Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions*. Dryen Press. USA
- Radhi Fahmi, 2008, Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, Antar Komitmen dan Jargon, Republika Jakarta
- Remi Soemitro Susyastic dan Tjiptoherijanto (2002), Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Jakarta
- Rusidi. 2006. *Hand Out* Metodologi Penelitian Elaborasi Pedoman Penelitian Tesis dan Desertasi UNPAD. Bandung
- Sadu Warsitodan dan Simangunsong Fernandus. 2004. Metodologi Ilmu Pemerintahan., MAPD. IPDN Jakarta.
- Sudarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi) Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
-,2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Alfabeta Bandung.
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian. Alfabeta. Bandung
- Sumoprawiro. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Syafri Wirman dan P. IsrawanSetyoko. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Alqaprint: Jatinangor.
- Thomas R.Dye. 1992. *Understanding Public Policy (Seven Edition)*. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey 07632
- Wahab, Abdul, Solichin. 2010. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Abdul, Solichin. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori dan Proses dan Studi Kasus). Media CAPS, Yogyakarta
- Yin K. Robert. 2002. Studi kasus Desain dan Metode. PT. Rajagrafindo Persada